

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR : 178 K/70/DJL.1/2016

T E N T A N G

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diselenggarakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berhasil guna dan berdaya guna, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1725); dan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL,



J A R M A N

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002

Telepon : (021) 5225180 (5 saluran)

Faks : 5256044-5256066

Web: www.djpe.esdm.go.id

BERITA ACARA

**PERSETUJUAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2015 - 2019**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07 - 08 Kuningan Jakarta Selatan, kami Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan:

menyetujui Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 – 2019 dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur (manajemen perubahan), pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 – 2019 juga telah ditetapkan program *Quick Wins* yang merupakan program unggulan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Demikian Berita Acara Persetujuan Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 – 2019.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Ir. Agoes Triboesono, M.Eng
NIP. 195810271986031001
2. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
β Ir. Alihuddin Sitompul, MM
NIP. 195802281986031001
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Ir. Satya Zulfanitra, M.Sc
NIP. 195701161986032001
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Ir. Munir Ahmad
NIP. 196112171992031001











Mengetahui
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Ir. Jarman, M.Sc
NIP. 195703231984031001

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

2015-2019

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1
I.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).....	2
I.3. Landasan Yuridis Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	4
I.4. Nilai-Nilai KESDM Sebagai Landasan Filosofis Road Map Reformasi Birokrasi	8
 BAB II. GAMBARAN BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	 9
II.1. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	9
A. Manajemen Perubahan.....	9
B. Penguatan Pengawasan	9
C. Penguatan Akuntabilitas.....	9
D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan	10
E. Penataan Tata Laksana	10
F. Penataan Sistem Manajemen SDM	10
G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	11
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	11
 II.2. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.....	 11
A. Manajemen Perubahan.....	12
B. Penguatan Pengawasan	12
C. Penguatan Akuntabilitas.....	12
D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan	12
E. Penataan Tata Laksana	13
F. Penataan Sistem Manajemen SDM	13
G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	13
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	14
 II.3. Tantangan dan permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	 14

A. Manajemen Perubahan.....	14
B. Penguatan Pengawasan	15
C. Penguatan Akuntabilitas.....	15
D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan	15
E. Penataan Tata Laksana	15
F. Penataan Sistem Manajemen SDM	15
G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	16
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	16
 BAB III. AGENDA REFORMASI BIROKRASI	17
A. Manajemen Perubahan.....	18
B. Penguatan Pengawasan	18
C. Penguatan Akuntabilitas.....	19
D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan	21
E. Penataan Tata Laksana	21
F. Penataan Sistem Manajemen SDM	22
G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	23
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	24
I. Quick Wins	26
 BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI	27
BAB V. PENUTUP	29
 LAMPIRAN RENCANA AKSI	30

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Penyediaan tenaga listrik sebagai salah satu usaha yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator terwujudnya keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional adalah terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang KESDM menjadi perwujudan dari amanat pasal 33 UUD 1945. Dengan Peraturan Presiden ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah Terwujudnya Penyediaan Tenaga Listrik yang Efisien, Berkelanjutan, Aman, Mengandalkan Kemampuan Sendiri dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah:

1. Meningkatkan Keandalan Pasokan Tenaga Listrik.
2. Menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik.
3. Mendorong Diversifikasi Energi Primer untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4. Melaksanakan Pengaturan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan.
5. Mendorong Penyediaan Subsidi Listrik yang Tepat Sasaran serta Rasionalisasi Harga Energi Listrik.
6. Menciptakan Iklim Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan yang Kondusif.
7. Melaksanakan Pengaturan Usaha Penyediaan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
8. Mewujudkan Manajemen, Birokrasi dan SDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Profesional.

I.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga Indonesia. Rasio elektrifikasi pada tahun 2015 direncanakan sebesar 87,35% dan ditargetkan menjadi sebesar 97% tahun 2019.

Beberapa infrastruktur dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendorong rasio elektrifikasi pada tahun 2015-2019, antara lain:

- a. Pembangkit listrik, dengan rencana penyelesaian proyek sekitar 42,9 GW selama 5 tahun, terdiri dari 35,5 GW proyek baru dan 7,4 GW proyek yang sudah berjalan. Dengan adanya tambahan pembangunan pembangkit tersebut maka kapasitas terpasang pembangkit pada tahun 2015 direncanakan menjadi sebesar 57 GW dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 95 GW.
- b. Transmisi listrik, dengan rencana pembangunan sekitar 46 ribu kms selama 5 tahun atau rata-rata sekitar 9.000 kms per tahun.

Tabel 1.1.
RPJM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 s.d. 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi							
1.	Rasio Elektrifikasi	%	87	90	93	95	97
2.	Rasio Desa Berlistrik	%	98	99	99	100	100
3.	Infrastruktur ketenagalistrikan:						
	a. Penambahan kapasitas pembangkit	MW	3.782	4.212	6.389	9.237	19.319
	b. Penambahan penyaluran tenaga listrik	kms	11.805	10.721	10.986	7.759	5.417
4.	Instalasi penyediaan tenaga listrik yang Laik operasi						
	a. Persentase Pembangkit	%	90	90	90	90	90
	b. Persentase Penyaluran	%	90	90	90	90	90
5.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	914	985	1.058	1.129	1.200
Sasaran strategis: Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik							
6.	Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik	%	8,9	8,7	8,55	8,45	8,39
7.	Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik	%	8,85	6,97	4,66	2,08	2,04
Sasaran strategis: Terpantaunya subsidi listrik							
8.	Subsidi Listrik	Triliun Rp	66,15	69,76	74,90	80,60	89,41
Sasaran strategis: Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan							
9.	Investasi sub sektor ketenagalistrikan	Miliar US\$	11,2	16,4	20,4	19,6	15,9
Sasaran strategis: Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagaslistrikan							
10.	Regulasi bidang ketenagalistrikan	Peraturan	7	3	3	2	1

Sumber: Renstra KESDM 2015 – 2019

Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik, diarahkan untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun, mengingat BBM merupakan sumber energi primer pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam bauran energi pembangkit tahun 2015 direncanakan sebesar 8,85% sebagaimana APBN-P 2015 dan terus diturunkan menurun menjadi sekitar 2,04% pada tahun 2019 seiring dengan ditingkatkannya porsi batubara melalui PLTU dan EBT melalui PLTP, PLT Bioenergi, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTBayu.

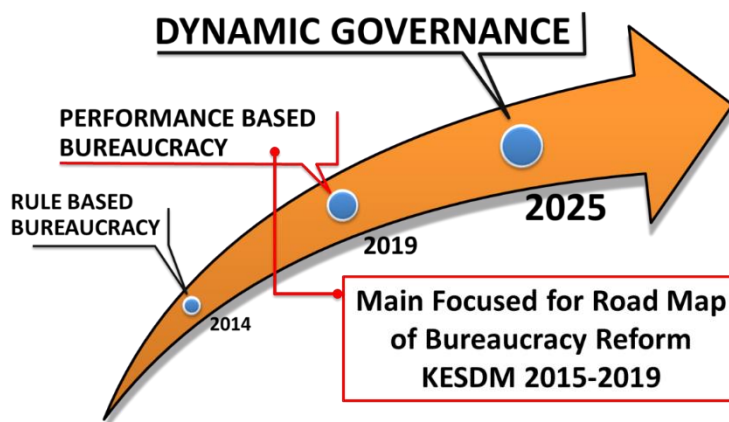
Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerintah dalam investasi di subsektor ketenagalistrikan cukup besar. Lebih dari Rp. 3 triliun per tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik. Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US\$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada tahun 2019 direncanakan sekitar US\$ 15,9 miliar, utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW.

Untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai salah satu unit dari Kementerian ESDM perlu melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi berperan penting untuk memperbaiki proses pencapaian hasil yang terdiri atas upaya penanganan krisis, akselerasi eksekusi program-program strategis serta sinergi dan penguatan kelembagaan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 dimaksudkan sebagai gambaran dalam melakukan menyiapkan program-program yang *good governance*.

I.3. LANDASAN YURIDIS PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor: 2.E/70/MEM/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya sehingga target kinerja dan kegiatan tahun per tahun akan jelas dan terukur seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1.
Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia



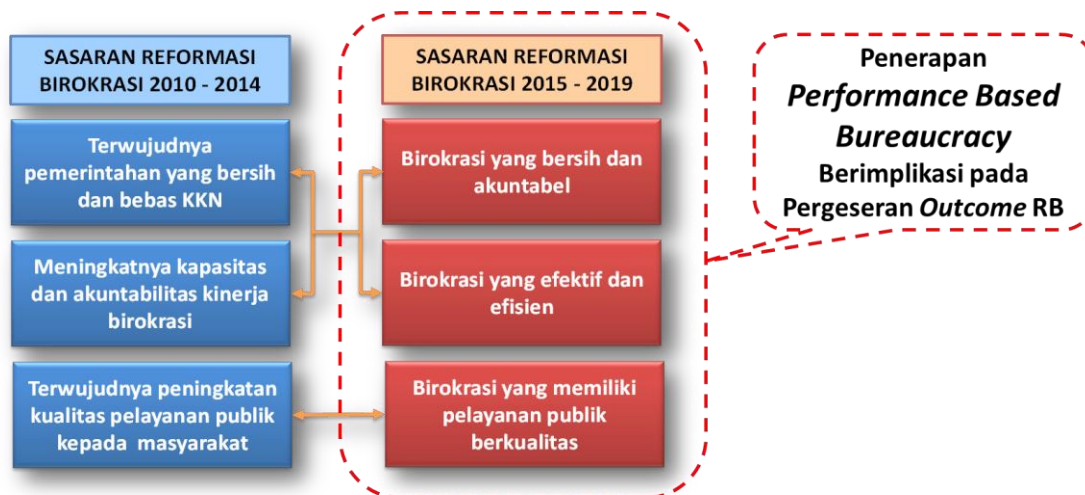
Sumber : PermenPAN-RB No. 11/2015

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015 - 2019 telah memasuki tahapan pemerintahan berbasis kinerja (*performance based bureaucracy*) dengan ciri utama:

1. Penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil);
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi pada setiap level.

Penerapan *performance based bureaucracy* berimplikasi pada pergeseran sasaran Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut.

Gambar 1.2.
Perubahan sasaran strategis Reformasi Birokrasi

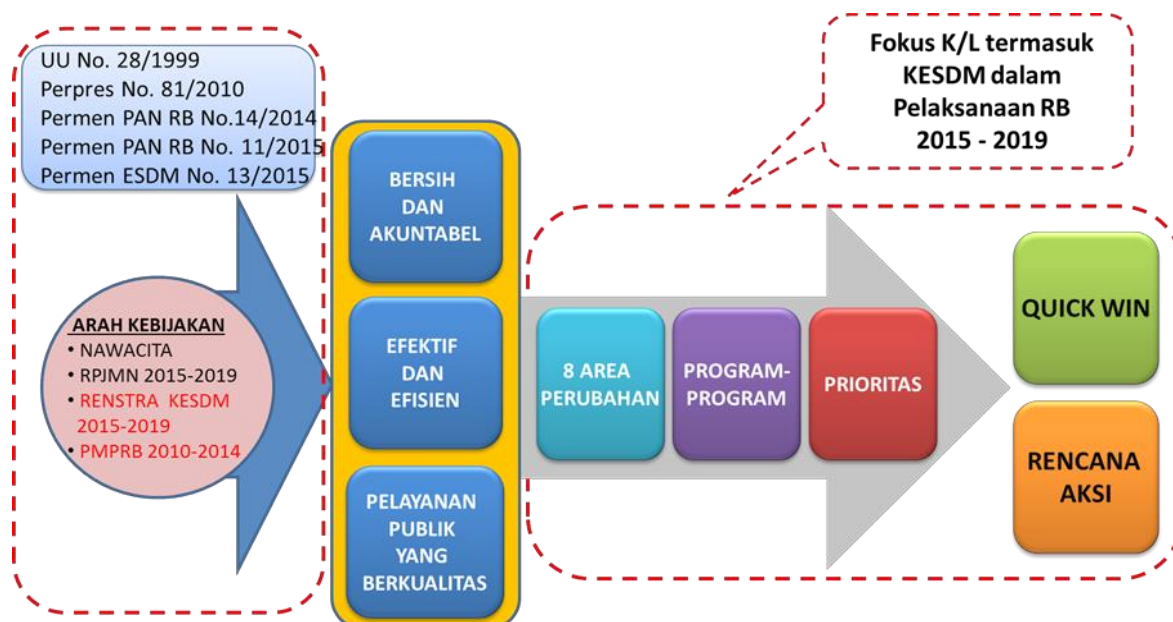


Sumber: Road Map KESDM 2015 - 2019

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 adalah bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang telah ditetapkan sebelumnya dan diselaraskan dengan RPJMN 2015 - 2019 serta Renstra KESDM 2015 - 2019. Road Map Reformasi Birokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan karena perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Selain itu perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan Reformasi Birokrasi dalam lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta berkontribusi pada terciptanya budaya perubahan skala nasional. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Substansi Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 terdiri atas sasaran Reformasi Birokrasi dan strategi implementasinya yang meliputi 8 area perubahan, quick wins, program-program dan rencana aksi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta sasaran Reformasi Birokrasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menekankan pada penciptaan terobosan baru, membiasakan berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada serta mengurai sumbatan-sumbatan birokrasi dengan upaya luar biasa pada aspek pelayanan publik, tatalaksana, dan akuntabilitas publik.

Gambar 1.3.
Kerangka Keterkaitan Arah Kebijakan dan Road Map Reformasi Birokrasi



Sumber: Road Map RB KESDM 2015 - 2019

Agar Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 lebih terstruktur dan sistematis maka disusun dalam 8 (delapan) area perubahan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. Program Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meliputi 8 (delapan) area perubahan dimaksudkan agar perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan. Bahkan proses perubahan dapat segera diperbaiki ketika tidak lagi relevan dengan kondisi terkini.

Selain penyempurnaan di atas, terdapat pula tambahan sasaran dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi sebagai sarana penguatan birokrasi pemerintah 2015 - 2019 sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015. Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan ukuran-ukuran kuantitatif keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara nasional termasuk yang akan dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2015 - 2019 dengan indikator- indikator seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini WTP atas Laporan Keuangan	%	74	95
	2. Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1- 5	1	3
	3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1- 5	1	3
	4. Instansi Pemerintah yang akuntabel	%	39,3	85
	5. Penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	%	30	80
Birokrasi yang efektif dan efisien	1. Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata nasional	Skor 1 - 100	47	75
	2. Indek Profesionalisme ASN	Skor 1 - 100	76	86
	3. Indeks e-government Nasional	Skor 0 - 4	2,66	3,4
Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas	1. Indeks Integritas Nasional	Skor 0 -10	7,22	9
	2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95
	3. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	%	64	100

Sumber: PermenPAN-RB No. 11/2015

I.4. NILAI-NILAI KESDM SEBAGAI LANDASAN FILOSOFI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Nilai-nilai merupakan prinsip yang dianggap benar secara bersama, menjadi jati diri individu dalam keseluruhan organisasi, menimbulkan rasa bangga dan menggugah semangat yang akan membimbing organisasi menjadi terus bertumbuh. Dalam sebuah organisasi, nilai-nilai memiliki keterkaitan yang erat dengan visi-misi organisasi. Dengan adanya nilai-nilai ini, maka akan menjadi bahan pendorong bagi setiap elemen di organisasi untuk melakukan Reformasi Birokrasi guna mencapai visi dan misi organisasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi KESDM serta menjadikan KESDM sebagai institusi pemerintah yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, maka KESDM telah menyusun dan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1808.K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-nilai KESDM. Nilai-nilai KESDM terdiri atas:

1. Jujur
Memiliki makna berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara.
2. Profesional
Memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.
3. Melayani
Memiliki makna memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik.
4. Inovatif
Memiliki makna berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.
5. Berarti
Memiliki makna menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi manfaat bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin dan memecahkan masalah.

Nilai-nilai KESDM menjadi landasan filosofis di dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019. Keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, internalisasi dan implementasi nilai-nilai oleh semua elemen birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan karena nilai-nilai KESDM menjadi pondasi bagi pola perilaku dan tata kerja di dalam institusi serta sebagai suatu kebanggaan.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

II.1. KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Manajemen Perubahan

Kemajuan yang telah dicapai pada program manajemen perubahan (mental perilaku aparatur) sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, SK Dirjen Ketenagalistrikan 335 K/73/DJL.1/2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang ditetapkan setiap tahun.
2. Telah dibentuk Tim Manajemen Perubahan, SK Dirjen Ketenagalistrikan No. 35 K/05/DJL.1/2013 tentang Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
3. Sosialisasi budaya kerja organisasi telah dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Nopember 2014
4. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti KKN oleh Irjen KESDM, KPK, dan Bareskrim Polri, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2015
5. Sosialisasi Nilai-Nilai KESDM melalui Banner

B. Penguatan Pengawasan

Kemajuan yang telah dicapai dalam penguatan pengawasan adalah:

1. Pembentukan Satgas pelaksana sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), SK Dirjen No 3 K/07/DJL.1/2015 tgl 2 Januari 2015 tentang Satuan Tugas pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan
3. Penilaian Resiko di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

C. Penguatan Akuntabilitas

Kemajuan yang telah dicapai dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

1. Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2014 oleh Inpektorat Jenderal KESDM, dengan nilai A (85,83)

2. Telah disusun Perjanjian Kinerja TA. 2015 yang ditandatangani oleh Eselon I dan Eselon II

D. Penataan Dan Penguatan Kelembagaan

Kemajuan yang telah dicapai pada penataan dan penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Telah diusulkan Struktur, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Usulan perubahan hanya nama jabatan struktural eselon III dan IV untuk memperkuat Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

E. Penataan Tata Laksana

Kemajuan yang telah dicapai dalam penataan Tatalaksana adalah sebagai berikut:

1. Telah disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, SK Dirjen Ketenagalistrikan Nomor: 7 K/80/DJL.1/2014 tentang SOP AP dilingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebanyak 104 SOP
2. Telah disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, SK Dirjen Ketenagalistrikan Nomor: 8 K/80/DJL.1/2014 tentang SOP AP Pelayanan Internal dilingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, sebanyak 56 SOP.
3. Implementasi tata persuratan dinas online di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (appsurat.djk.esdm.go.id)

F. Penataan Sistem Manajemen SDM

Kemajuan yang telah dicapai dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah:

1. Analisis jabatan untuk setiap jabatan struktural maupun fungsional umum. Pelaksanaan analisa jabatan dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan
2. Evaluasi Jabatan telah menghasilkan informasi faktor jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam jabatan pada peta jabatan
3. Pemetaan kompetensi pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu, melalui kegiatan assesment (baru sebanyak 146 PNS)
4. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai melalui identifikasi diklat pegawai, penyertaan diklat, seminar dan tugas belajar

5. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Ketenagalistrikan Pusat maupun Daerah dengan bekerjasama dengan Polri
6. Peningkatan pelayanan kesehatan pada poliklinik umum, poliklinik gigi, serta laboratorium analis medis.

G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kemajuan yang telah dicapai dalam penataan Peraturan Perundangan-Undangan adalah telah diterbitkan peraturan perundang-undangan di sektor Ketenagalistrikan 2014-2015, antara lain:

- 1 Peraturan Pemerintah
- 3 Peraturan Presiden
- 14 Peraturan Menteri ESDM
- 4 Keputusan Menteri ESDM

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kemajuan yang telah dicapai dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

1. Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Pelaksanaan Coffee Morning yang dihadiri para stakeholders untuk mensosialisasikan peraturan terbaru serta mendapatkan masukan tentang Ketenagalistrikan
3. Pelayanan publik antara lain:
 - a. Sistem Registrasi Sertifikasi Laik Operasi (SLO Online)
 - b. Sistem Informasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SI SKTTK Online);
 - c. Sistem Informasi Sertifikasi Badan Usaha (e-SBU Online);
 - d. Pengaduan Konsumen Listrik;
 - e. KIOSK Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 - f. Dashboard Sistem Manajemen Informasi Ketenagalistrikan
 - g. Informasi SNI bidang Ketenagalistrikan

II.2. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan pada 8 (delapan) area perubahan adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan

Harapan pemangku kepentingan terkait manajemen perubahan antara lain:

1. Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
2. Birokrasi yang mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

B. Penguatan Pengawasan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan pengawasan antara lain:

1. Memperoleh opini WTP dari BPK;
2. Instansi pemerintah dengan kriteria WBK;
3. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan; dan
4. Penguatan kebijakan pengawasan.

C. Penguatan Akuntabilitas

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Akuntabilitas antara lain:

1. Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja;
2. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
3. Pelaksanaan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem reward and punishment dalam penerapan manajemen kinerja;
5. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;
6. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja; dan
7. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.

D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan penataan dan penguatan organisasi antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergi antar unit di lingkungan Kementerian ESDM;
3. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Meningkatnya sinergi kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

E. Penataan Tata Laksana

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan tatalaksana antara lain:

1. Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
2. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada publik;
5. Mentransformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat

F. Penataan Sistem Manajemen SDM

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain:

1. Meningkatnya tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan meningkatnya nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB);
2. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur;
3. Meningkatnya motivasi, kinerja, kesejahteraan dan kesehatan pegawai;
4. Terwujudnya penataan jumlah dan distribusi PNS;
5. Terciptanya pengembangan kompetensi pegawai;
6. Terwujudnya pengelolaan mutasi pegawai yang ideal;
7. Terciptanya penataan sistem rekrutmen pegawai;
8. Terbentuknya penyusunan pola karir;
9. Terciptanya penetapan kinerja individu yang ideal;
10. Terwujudnya penegakan disiplin pegawai yang baik;
11. Terciptanya peningkatan integritas pegawai; dan
12. Pembangunan dan pengembangan database pegawai.

G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
2. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron;
3. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya sektor Ketenagalistrikan; dan

6. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi publik.

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik antara lain:

1. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
2. Kemudahan akses informasi dan pelayanan yang memadai;
3. Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan Survei pengaduan masyarakat untuk melihat keinginan masyarakat;
4. Mempercepat pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
5. Penerapan sistem informasi secara online sebagai langkah percepatan pelayanan publik;
6. Peningkatan kemampuan bagi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
7. Penegakan reward and punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik secara terpadu;
9. Mengembangkan sistem informasi pelayanan investasi sektor Ketenagalistrikan berbasis web secara online; dan
10. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan.

II.3. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PELAKSAAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2010-2014 maka tantangan dan permasalahan pada delapan area perubahan adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan/ mental aparatur tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Belum disusunnya target, sasaran dan area kerja perubahan sebagai pedoman dalam membantu pengukuran keberhasilan perubahan;
2. Belum disusunnya strategi perubahan dan strategi komunikasi dalam mewujudkan program manajemen perubahan;
3. Belum disusunnya instrumen (*tools*) pengukuran perubahan dalam membantu menganalisis keberhasilan; dan
4. Peningkatan kinerja yang sesuai dengan tata nilai KESDM belum terlaksana

B. Penguatan Pengawasan

Pada area pengawasan tantangan dan permasalahan utama adalah Penguatan peran SPIP belum efektif karena satuan tugas yang dibentuk belum seluruhnya dapat melaksanakan tugasnya.

C. Penguatan Akuntabilitas

Pada area akuntabilitas tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN. Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.

D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan birokrasi pemerintahan masih belum efektif, yaitu:

1. Perubahan pola penataan organisasi kementerian pada setiap pergantian kabinet;
2. Adanya perkembangan isu maupun tuntutan peningkatan pelayanan yang memerlukan unit organisasi sesuai dengan beban kerjanya; dan
3. Perubahan kebijakan yang berdampak pada perlunya penataan kelembagaan.

E. Penataan Tata Laksana

Pada area tatalaksana tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkan proses bisnis KESDM khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai acuan dalam penyusunan SOP;
2. SOP belum dipahami secara menyeluruh oleh personil yang terkait sehingga pelaksanaan belum efektif;
3. Perubahan kebijakan tidak dibarengi dengan perubahan SOP

F. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada area SDM Aparatur tantangan dan permasalahan utama,

1. Belum berkembangnya beberapa jabatan fungsional tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Belum terwujudnya kesejahteraan pegawai yang optimal sesuai dengan beban kerja jabatan masing- masing;

G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan peraturan perundang-undangan di sektor Ketenagalistrikan dilakukan karena adanya permasalahan yang harus diselesaikan, sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan jumlah aparatur pada jabatan fungsional penyusunan peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan;
2. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah;
3. Beberapa peraturan perundang-undangan sektor Ketenagalistrikan belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pada area pelayanan publik tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruh jenis layanan dapat memberikan layanan yang terbaik, sehingga masih terus dilakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dan perbaikan baik sarana, prasarana, prosedur maupun sistem layanan;
2. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai salah unit di lingkungan Kementerian ESDM mempunyai kegiatan yang strategis demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengharuskan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif, serta berorientasi kepada pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan periode 2015 - 2019, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
 - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
 - d. Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - a. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*.
 - b. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - c. Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - d. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
 - e. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
 - f. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 1. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan
 2. Budaya pelayanan
 3. Penguatan Monev Kinerja
 4. Sistem Pengaduan

Agenda Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 - 2019 adalah mengarusutamakan perubahan wajah birokrasi yang sebelumnya bersifat kaku, mekanistik, dan impersonal menjadi birokrasi yang fleksibel dan inovatif dalam memberikan pelayanan prima kepada publik serta adaptif menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis eksternalnya.

Rencana perubahan tersebut direpresentasikan ke dalam 8 (delapan) area perubahan:

A. Manajemen Perubahan

Program kegiatan yang akan dilakukan dalam Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan khususnya pada area manajemen perubahan terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu penataan pola pikir dan budaya kerja, penguatan Reformasi Birokrasi, serta penataan dan internalisasi budaya pelayanan. Strategi pelaksanaan dalam area ini adalah dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, pengembangan dan penyempurnaan Road Map RB Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, dan membentuk aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan publik. Hasil yang diharapkan adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, terinternalisasinya program Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ukuran keberhasilan dari program ini adalah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 3.1
Program pada area manajemen perubahan dari tahun 2015 - 2019



B. Penguatan Pengawasan

Program kegiatan dalam area pengawasan merupakan lanjutan dari program Reformasi Birokrasi periode sebelumnya. Program kegiatan di area ini terdiri dari 2 (dua) program yaitu penguatan kebijakan pengawasan dan penguatan pengawasan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah:

1. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
3. Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. *Whistle Blowing System* (WBS);

Ukuran keberhasilan dalam area pengawasan diukur dengan:

1. Adanya opini WTP atas LKT Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Peningkatan unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM
3. Tingkat penanganan benturan kepentingan yang baik; dan
4. Berkurangnya KKN.

Gambar 3.2
Program pada area pengawasan dari tahun 2015 - 2019.

Komitmen menuju WBK/WBBM	Penyiapan best practise WBK/WBBM	Penyiapan best practise WBK/WBBM	Pelaksanaan best practise WBK/WBBM	Pelaksanaan best practise WBK/WBBM
Penetapan SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP
2015	2016	2017	2018	2019
Komitmen Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Monitoring penanganan benturan kepentingan
Sosialisasi WBS Online	Sosialisasi WBS Online	Kuesioner pelaksanaan WBS ke stakeholder	Penguatan WBS	Penguatan WBS
Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN

C. Penguatan Akuntabilitas

Program kegiatan dalam area akuntabilitas dilakukan dengan strategi penguatan akuntabilitas kinerja. Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan catatan tentang hasil-hasil yang dicapai dari fungsi kegiatan selama kurun waktu tertentu yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi ukuran atau indikator yang memberikan informasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menjadi kata kunci sebagai perwujudan dari kewajiban Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sektor ketenagalistrikan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menerapkan SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta pelaporan data kinerja.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan evaluasi kinerja merupakan langkah untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

Hasil yang diharapkan dari program penguatan akuntabilitas kinerja adalah semakin meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tolok ukur keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori 'Baik'.

Gambar 3.3
Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 - 2019.



D. Penataan dan Penguatan Kelembagaan

Program kegiatan dalam area kelembagaan dilakukan dengan strategi melakukan penguatan organisasi di unit eselon 1 dengan tujuan agar terwujud lembaga yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih, dan bersinergi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tatakelola KESDM yang lebih baik. Ukuran keberhasilan diukur dengan peningkatan nilai Indeks Penguatan Kelembagaan.

Gambar 3.4
Program pada area penataan dan penguatan organisasi dari tahun 2015 - 2019



E. Penataan Tata Laksana

Sistem tatalaksana yang baik akan mendorong proses pelayanan publik menjadi lebih cepat. Percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan e-government melalui pemanfaatan *Information Communication Technology* (ICT) yang dapat membuat sistem administrasi menjadi semakin efektif, efisien dan terintegrasi. Kegiatan yang dilakukan pada area tatalaksana terdiri dari 3 (tiga) program yaitu penguatan tatalaksana, pengembangan e-government, dan penerapan open government.

Hasil yang diharapkan dari program penguatan tatalaksana ini adalah:

1. Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terintegrasi, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara online;
3. Meningkatnya nilai indeks *e-government* (PeGI); dan
4. Penerapan *open government* yang berkualitas.

Ukuran keberhasilan dalam area penguatan tatalaksana ini adalah:

1. Penguatan kebijakan *e-government*, infrastruktur aplikasi, jaringan, informasi, pengelolaan dan layanan informasi publik;
2. Indeks persepsi korupsi;
3. Integritas pelayanan publik; dan
4. Indeks *e-government*;

Gambar 3.5.
Program pada area tatalaksana dari tahun 2015 – 2019

Peningkatan kapasitas jaringan dan data center	Peningkatan Sistem keamanan informasi, kapasitas jaringan dan data center	Peningkatan Sistem keamanan informasi, kapasitas jaringan dan data center	Peningkatan Sistem keamanan informasi, kapasitas jaringan dan data center	Peningkatan Sistem keamanan informasi, kapasitas jaringan dan data center
Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa	Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa	Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa	Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa	Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
2015	2016	2017	2018	2019
Penggunaan Tata Persuratan Dinas online	Penggunaan Tata Persuratan Dinas online	Penggunaan Tata Persuratan Dinas online	Penggunaan Tata Persuratan Dinas online	Penggunaan Tata Persuratan Dinas online
Penetapan SOP AP	Inventarisasi SOP AP dan Peta Proses Busines	Evaluasi SOP AP	Evaluasi SOP AP	Evaluasi SOP AP
Pemutakhiran Informasi Publik	Pemutakhiran Informasi Publik	Pemutakhiran Informasi Publik	Pemutakhiran Informasi Publik	Pemutakhiran Informasi Publik
		Pengintegrasian Aplikasi yang memiliki fungsionalitas sama	Pengintegrasian Aplikasi yang memiliki fungsionalitas sama	Pengintegrasian Aplikasi yang memiliki fungsionalitas sama

F. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam area perubahan sumber daya manusia (SDM) aparatur mempunyai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi, serta memiliki pelayanan publik berkualitas melalui program percepatan dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur. Program area perubahan SDM aparatur dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur;
2. Pengembangan standar kompetensi;
3. Pengembangan karir;
4. Pola mutasi dan promosi SDM Aparatur;
5. Survei kompetensi SDM Aparatur;
6. Pengembangan standar kompetensi
7. *Assessment* SDM Aparatur;
8. Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian dan pemutakhiran data SDM Aparatur;
9. Pengembangan SDM Aparatur berbasis kinerja;
10. Analisis beban kerja;
11. Analisis jabatan;
12. Pengembangan PPNS Ketenagalistrikan;
13. Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan;
14. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur.

Hasil yang diharapkan dari area perubahan SDM aparatur adalah meningkatnya kompetensi SDM aparatur. Ukuran keberhasilan program ini diukur dengan Nilai Indeks Kinerja dan Profesionalitas.

Gambar 3.6
Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 - 2019

Implementasi SIPEG & Pemutakhiran Data	Implementasi SIPEG & Pemutakhiran Data	Implementasi SIPEG & Pemutakhiran Data	Implementasi SIPEG & Pemutakhiran Data	Implementasi SIPEG & Pemutakhiran Data
Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM
2015	2016	2017	2018	2019
Assessment Pegawai	Assessment Pegawai	Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Analisis Jabatan dan Beban Kerja
Diklat dan Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Diklat dan Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Diklat dan Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Diklat dan Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Diklat dan Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan
Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan
		Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

G. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program kegiatan dalam area perubahan penataan perundang-undangan mempunyai sasaran terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi dengan program penguatan peraturan perundangan. Program ini dilakukan dengan strategi implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui evaluasi, kajian, deregulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan ICT dalam perumusan peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Hasil yang diharapkan dari adanya program ini adalah:

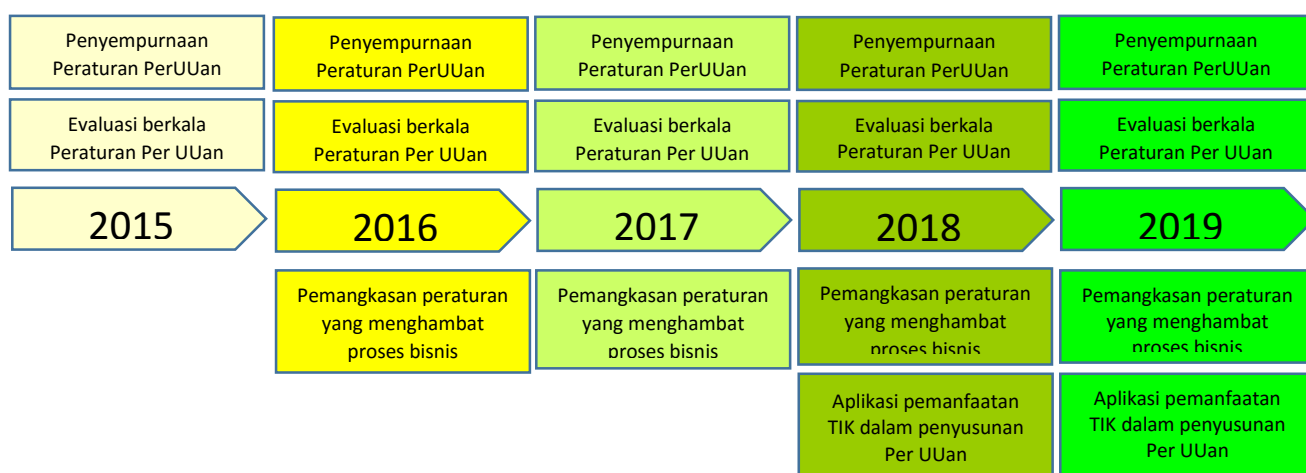
1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:

1. Tersusunnya daftar identifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan atau ditetapkan atau diundangkan oleh Kementerian/ Lembaga dan sektor terkait dalam bentuk kerangka legislasi dan regulasi sektor Ketenagalistrikan;
2. Kesesuaian rancangan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar baik secara vertikal maupun horisontal yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat;
3. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Diundangkannya Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
5. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Gambar 3.7

Program pada area penataan perundang-undangan dari tahun 2015 - 2019



H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui 5 (lima) strategi yaitu:

1. Peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
2. Modernisasi sistem manajemen pelayanan publik yang meliputi SDM, TIK, dan standar pelayanan;
3. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik;
4. Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter; dan
5. Penguatan integritas dalam pelayanan publik.

Ukuran keberhasilan dari program terdiri atas 4 (empat) indikator yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Survei kepuasan masyarakat;
3. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau);
4. Terjaminnya pelayanan investasi sektor Ketenagalistrikan secara terpadu, efisien, transparan, kepuasan penerima layanan, serta penyediaan sistem pendataan yang akurat dan mutakhir

Hasil yang diharapkan dari program ini terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu:

1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
3. Meningkatnya profesionalitas aparatur.

Gambar 3.8
Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 - 2019.

Pendelegasian kewenangan pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik
pelayanan terpadu secara elektronik	pelayanan terpadu secara elektronik	pelayanan terpadu secara elektronik	Evaluasi pelayanan terpadu secara elektronik	Penyempurnaan pelayanan terpadu secara elektronik
2015	2016	2017	2018	2019
Evaluasi Pengaduan Konsumen Listrik	Evaluasi Pengaduan Konsumen Listrik	Evaluasi Pengaduan Konsumen Listrik	Evaluasi Pengaduan Konsumen Listrik	Evaluasi Pengaduan Konsumen Listrik
Evaluasi Coffee Morning	Evaluasi Coffee Morning	Evaluasi Coffee Morning	Evaluasi Coffee Morning	Evaluasi Coffee Morning
Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik

I. Quick Wins

Program *quick wins* Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan program unggulan yang ditetapkan dan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuan dari program *quick wins* diharapkan perubahannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Gambar 3.9.
Program *quick wins* Reformasi Birokrasi 2015 - 2019.

2015	2016	2017	2018	2019
Coffee Morning dalam rangka forum sosialisasi dan konsultasi publik dalam penyusunan regulasi dan kebijakan	Coffee Morning dalam rangka forum sosialisasi dan konsultasi publik dalam penyusunan regulasi dan kebijakan	Coffee Morning dalam rangka forum sosialisasi dan konsultasi publik dalam penyusunan regulasi dan kebijakan	Coffee Morning dalam rangka forum sosialisasi dan konsultasi publik dalam penyusunan regulasi dan kebijakan	Coffee Morning dalam rangka forum sosialisasi dan konsultasi publik dalam penyusunan regulasi dan kebijakan
Inovasi pelayanan Publik	Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi	Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi
Pelaksanaan Aplikasi Tata Persuratan Dinas Online	Pengembangan Aplikasi Tata Persuratan Dinas Online	Pengembangan Aplikasi Tata Persuratan Dinas Online	Pengembangan Aplikasi Tata Persuratan Dinas Online	Pengembangan Aplikasi Tata Persuratan Dinas Online
		Penyederhanaan SOP Pelayanan Publik	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik	Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Publik
		Survei Kepuasan Pelayanan Publik	Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Survei Kepuasan Pelayanan Publik

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan untuk memastikan semua aktifitas kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan lancar dan dicatat dengan baik. Monitoring dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi yang tepat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi bila dikaitkan dengan rencana yang telah disusun;
3. Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
4. Memperbaiki proses pelaksanaan program.

Kegiatan yang dilakukan pada monitoring meliputi:

1. Observasi, pengawasan, verifikasi, dan validasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
2. Memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktifitas Reformasi Birokrasi sesuai dengan Road Map yang telah disetujui;
3. Mengolah hasil monitoring;
4. Memberikan masukan guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;
5. Laporan hasil monitoring disusun paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi adalah sebuah proses untuk menilai secara obyektif efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam sebuah evaluasi, dilakukan pengukuran hasil capaian dan dampak yang diakibatkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga didapat sebuah rekomendasi sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan.

Evaluasi dilaksanakan bertujuan:

1. Menguji suatu kegiatan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatannya;
2. Menguji pelaksanaan kegiatan terkait perlu tidaknya dilanjutkan; dan
3. Memberi masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tugas pokok tim adalah menjadi penjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menjamin bahwa semua persyaratan dan aturan telah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaksanaan dari setiap area perubahan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi, Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan memberikan masukan-masukan setiap area pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kriteria keberhasilan dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilihat dari kemampuan tim menyusun laporan dan memberi rekomendasi-rekomendasi sesuai tugas pokoknya secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahunan dan 5 (lima) tahunan.

BAB IV PENUTUP

Road Map reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 – 2019 menjadi arah (*guidance*) untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan periode 2015 – 2019. Road Map ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi KESDM periode 2010 – 2014. Dalam proses penyusunannya, Road Map ini mengacu kepada Road Map Reformasi Birokrasi KESDM periode 2015 – 2019 yang mengakomodir arahan dan masukan dari Menteri ESDM, Para pimpinan unit Eselon I, serta dukungan data dan informasi terkait implementasi Reformasi Birokrasi tahun-tahun sebelumnya, menyelaraskan dengan rencana strategi (Renstra) KESDM tahun 2015 - 2019, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015.

Reformasi bukanlah sebuah perjalanan yang terputus (*discontinue*) namun suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Dalam perjalanan pelaksanaannya, dokumen Road Map ini merupakan “*living document*” yang dinamis dan dapat disempurnakan kembali jika ada perubahan strategis untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen yang tinggi, kesabaran, keteguhan, konsistensi dan tanggung jawab pimpinan serta seluruh jajaran aparatur Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Namun demikian, Reformasi Birokrasi ini tidak akan optimal bila tidak didukung oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan sektor ketenagalistrikan, baik aparatur pemerintah lainnya, masyarakat, maupun para pelaku bisnis.

Demikian Road Map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2015 – 2019 yang kami susun ini agar dapat menjadi instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi semua aparatur KESDM untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

LAMPIRAN RENCANA AKSI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2015-2019

Lampiran 1 : Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Manajemen Perubahan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan RB	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mental Aparatur	Penataan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan)	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi	Indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas, meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks integritas, Meningkatkan	Membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan				
						Menyusun dan menetapkan Nilai-nilai KESDM	Pembentukan agen perubahan, internalisasi Nilai-nilai KESDM			
							Menyusun budaya kerja	Kode Etik, dan Kode Perilaku KESDM		
Birokrasi yang efektif dan efesien		Penguatan reformasi birokrasi	Pengembangan dan penyempurnaan road map RB Ditjen Ketenagalistrikan	Tersusun dan terinternalisasi nya program RB	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat	Menyusun Road Map RB 2015-2019	Sosialisasi dan internalisasi road map RB 2015-2019			
									Menyusun draft road map RB 2020-2025	
			Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program RB				
Pelayanan publik yang berkualitas		Penataan budaya pelayanan	Membentuk Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik KESDM	Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Mapping stakehol der	Sosialisasi Budaya kerja dan Motivasi Kerja	Sosialisasi Budaya kerja dan Motivasi Kerja	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima	Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima

Lampiran 2 : Roadmap Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Perubahan Pengawasan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pengawasan	Penguatan kebijakan pengawasan	1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergi 3. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa	Memperoleh Opini WTP dari BPK	Opini WTP	Peningkatan peran APIP dalam laporan keuangan KESDM	Meningkatkan sinergitas dalam pengawasan dan pelaporan keuangan	Meningkatkan sinergi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Meningkatkan sinergi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	
				Instansi Pemerintah dengan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM	Komitmen menuju WBK/WBBM	Penyiapan best practise WBK/WBBM	Penyiapan best practise WBK/WBBM	Pelaksanaan best practise WBK/WBBM	Pelaksanaan best practise WBK/WBBM
				Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan	Tingkat kapabilitas SPIP	Penetapan SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP	Evaluasi SPIP
				Penanganan benturan kepentingan	Tingkat penanganan benturan kepentingan yang baik	Komitmen Ditjen Ketenagalistrikan terhadap penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan	Monev pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan
				Whistleblowing System (WBS)	Berkurangnya Tingkat Pengaduan	Sosialisasi WBS Online	Sosialisasi WBS Online	Kuesioner pelaksanaan WBS ke pemangku kepentingan	Penguatan WBS	Penguatan WBS
				Pemerintahan yang Bebas KKN	Berkurangnya KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN	Sosialisasi Anti KKN

Lampiran 3: Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Perubahan : Penguatan Akuntabilitas

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Akuntabilitas	Penguatan akuntabilitas kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kinerja dan Akuntabilitas	Ditjen Ketenagalistrikan dengan akuntabilitas kinerja yang baik	Menyusun kebijakan penguatan sistem akuntabilitas	Meningkatkan keterbukaan sistem pelaporan	Meningkatkan keterbukaan sistem pelaporan	Meningkatkan keterbukaan sistem pelaporan	
										Meningkatkan transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja
			Penguatan akuntabilitas kinerja	Perencanaan strategis sektor Ketenagalistrikan	Tercapainya Nawacita sektor Ketenagalistrikan	Tersusun Renstra KESDM 2015 - 2019	Pelaksanaan dan evaluasi renstra	Pelaksanaan dan revisi Renstra	Pelaksanaan dan evaluasi Renstra	Tercapainya seluruh Renstra

Lampiran 4 : Roadmap Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Perubahan Kelembagaan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Kelembagaan	Penguatan kelembagaan	Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.	Nilai Indeks Penguatan kelembagaan Baik	Penataan kelembagaan sesuai Perpres 68 Tahun 2015	Audit/ reviu kelembagaan			
							Penataan kelembagaan			
							Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah			
							Evaluasi kelembagaan			

Lampiran 5 : Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Perubahan Tatalaksana

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Tatalaksana	Pembangun an atau pengemban gan e- <i>government</i>	Meningkatnya penggunaan ti dalam proses penyelenggar aan manajemen pemerintahan	Nilai <i>Indeks e- Government (PeGI)</i>	Penguatan infrastruktur aplikasi	Pengintegrasian aplikasi yang memiliki fungsionalitas yang sama				
					Penguatan infrastruktur jaringan	Peningkatan kapasitas <i>data center</i>		Persiapan <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>	Implementasi DRC	
						Penyediaan dan peningkatan infrastruktur jaringan				
					Penguatan infrastruktur informasi	Peningkatan sistem manajemen keamanan informasi				
		Penerapan <i>open government</i>	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi	Penerapan <i>open government</i> yang berkualitas	Penguatan pengelolaan informasi publik	Penetapan dan pemutakhiran secara berkala daftar informasi publik				
					Evaluasi atas pelaksanaan publikasi informasi					
					Penyediaan dan pemberian informasi publik					
					Penguatan layanan informasi publik	Penyediaan dan pemberian informasi publik				
	Penguatan Tatalaksana (SOP)	Penguatan sinergi antar lembaga baik pusat maupun daerah	Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Penggunaan Tata Persuratan Dinas Online					
					Penyempurnaan tata naskah dinas dan kearsipan					
				Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas Pelayanan Publik	Inventarisasi SOP AP dan Peta Proses	Evaluasi SOP AP	Evaluasi SOP AP	Evaluasi SOP AP	Evaluasi SOP AP	
Peng percepatan pelaksanaan barang dan jasa					Peng percepatan pelaksanaan barang dan jasa	Peng percepatan pelaksanaan barang dan jasa	Peng percepatan pelaksanaan barang dan jasa	Peng percepatan pelaksanaan barang dan jasa		

Lampiran 6: Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Perubahan : Sumber Daya Manusia Aparatur

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	SDM Aparatur	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Pengembangan Pegawai	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Nilai Indeks kinerja dan Profesionalitas	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM	Identifikasi Diklat dan Pengembangan SDM
						Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan	Pembinaan PPNS Ketenagalistrikan
						Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan	Pembinaan Inspektur Ketenagalistrikan
			Assessment SDM Aparatur			Pelaksanaan Assessment Pegawai	Pelaksanaan Assessment Pegawai			
			Sistem Informasi Kepegawaian			Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran data SDM	Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran data SDM	Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran data SDM	Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran data SDM	
			Pengembangan Jabatan					Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
								Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Analisis Jabatan dan Beban Kerja	Analisis Jabatan dan Beban Kerja

Lampiran 7 : Road Map Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan RB	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang efektif dan efisien	Penataan peraturan perundang-undangan	Penguatan peraturan perundang-undangan	Implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui evaluasi, kajian, deregulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan TIK dalam perumusan peraturan	Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	Melakukan upaya penyempurnaan atau mengubah peraturan perundang-undangan sektor Ketenagalistrikan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horisontal				
				Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik		Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan pada sektor Ketenagalistrikan melalui pemutakhiran data dan penelaahan peraturan peraturan perundang-undangan				
							Pemangkasan peraturan yang menghambat proses bisnis bidang ketenagalistrikan	Pemangkasan peraturan yang menghambat proses bisnis bidang ketenagalistrikan	Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Ditjen Ketenagalistrikan	Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Ditjen Ketenagalistrikan
				.					Pemangkasan peraturan yang menghambat proses bisnis bidang ketenagalistrikan	

Lampiran 8 : Roadmap Refomasi Birokrasi 2015-2019 Area Pelayanan Publik

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan				
						2015	2016	2017	2018	2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009	Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014	Pendelegasian kewenangan pelayanan publik di BKPM dengan Permen ESDM No. 35 Tahun 2014
			Modernisasi sistem manajemen pelayanan publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan)		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyiapan pembangunan sistem pelayanan terpadu secara elektronik	Implementasi sistem pelayanan terpadu secara elektronik	Implementasi sistem pelayanan terpadu secara elektronik	Evaluasi sistem pelayanan terpadu secara elektronik	Penyempurnaan sistem pelayanan terpadu secara elektronik
			Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik		Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Pengaduan Konsumen Listrik	Pengaduan Konsumen Listrik	Pengaduan Konsumen Listrik	Pengaduan Konsumen Listrik	Pengaduan Konsumen Listrik
Birokrasi yang efektif dan efisien	Pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Membuka ruang partisipasi publik melalui <i>citizen charter</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Terjaminnya pelayanan investasi sektor Ketenagalistrikan secara terpadu, efisien, dan transparan, kepuasan	Coffee Morning kepada para stakeholders	Coffee Morning kepada para stakeholders	Coffee Morning kepada para stakeholders	Coffee Morning kepada para stakeholders	Coffee Morning kepada para stakeholders
Pelayanan Publik yang Berkualitas	Pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penguatan integritas dalam pelayanan publik	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan publik survey kepuasan masyarakat	Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan integritas penyelenggara pelayanan publik				
						Inovasi Pelayanan Publik				
						Survey Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan				